TRANSPARANSI DANA DESA SEBAGAI FAKTOR PENTING DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS PADA KANTOR PEMERINTAH DESA HILIR, KECAMATAN BALAI, KABUPATEN SANGGAU

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

MUHAMMAD NUR NIZAM

B1031211011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Muhammad Nur Nizam
Nim	: B1031211011
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Artikel	: Transparansi Dana Desa Sebagai Faktor Penting Dalam Mewujudkan Good Gevernance Dan Akuntabilitas Pada Kantor Pemerintah Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Artikel dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulisan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Artikel dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak,15 Februari 252025

Penulis,



Muhammad Nur Nizam

B1031211011

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Nizam

Nim : B1031211011

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Transparansi Dana Desa Sebagai Faktor Penting Dalam Mewujudkan Good Gevernance Dan Akuntabilitas Pada Kantor Pemerintah Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau.

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak,15 Februari 2025

Penulis,



Muhammad Nur Nizam

B1031211011

LEMBAR YURIDIS

Transparansi Dana Desa sebagai Faktor Penting dalam Mewujudkan Good Governance dan Akuntabilitas pada Kantor Pemerintah Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau

Penanggung Jawab Yuridis

Muhammad Nur Nizam
NIM. B1031211011

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Komprehensif : 10 Desember 2024

Majelis Penguji

No	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Angga P. Karpriana, S.E., M.Acc., Ak. NIP. 198611292014041001	23/12/2024	
2	Sekretaris Penguji	Wukuf Dilvan Rafa, M.Ak. NIP. 199609262022031013	23/12/2024	
3	Penguji 1	Ira Grania Mustika, S.E., M.M. NIP. 196911151996032002	23/12/2024	
4	Penguji 2	Amanah Hijriah, SE., MSA. NIP.199309112022032010	23/12/2024	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 24 DEC 2024
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita., S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Reputasi KAP, Biaya Audit, Rotasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Pemoderasi Komite Audit" dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis pada Program Sarjana Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, motivasi, semangat, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dari awal perkuliahan hingga kini penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M,Si. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura
3. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Vitriyan Espa, S.E., M.S.A., Ak., C.Ht., C.A. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
7. Bapak Angga P. Karpriana, S.E., M.Acc., Ak. selaku Dosen Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Bapak Wukuf Dilvan Rafa, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta menguji skripsi penulis.
9. Ibu Ira Grania Mustika, S.E., M.M. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta menguji skripsi penulis.
10. Ibu Amanah Hijriah, S.E., MSA. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta menguji skripsi penulis.
11. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Civitas Akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Kepada Ibu tercinta, terima kasih atas seluruh pengorbanan, semangat, nasihat dan kasih sayang yang diberikan. Berkat beliaulah penulis bisa sampai di bangku perkuliahan yang telah memberikan dukungan, pengorbanan, doa yang tiada henti dan kerja kerasnya sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar sarjana.
13. Teruntuk kakak tercinta Nanda Nur Fitria selaku donatur bagi penulis selama masa perkuliahan yang telah memberikan dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini, dan adik tercinta Dion Nur Ramadhan yang telah menjadi semangat sekaligus motivasi bagi penulis untuk membahagiakan adik satu – satunya.
14. Tentunya untuk diri saya sendiri Muhammad Nur Nizam yang telah kuat secara batin maupun mental dan tetap hidup dengan menjalankan perkuliahan dengan sebaik-baiknya, melewati masa – masa sulit dan menyelesaikan semua permasalahan dengan sebaik-baiknya.
16. M. Ikhsan Maulana selaku teman sekaligus mentor bagi penulis selama masa perkuliahan yang selalu membantu hingga pembutan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
17. Teruntuk Ade Ardiansyah selaku teman sekaligus rival billiard yang selalu menemani penulis dalam rasa jenuh akan dunia perkuliahan.
15. Angota grup Pulu-Pulu dan Info Masseh yang menjadi tempat keluh kesah penulis selama masa perkuliahan.

16. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, kontribusi dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik diwaktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk mendapatkan karya yang lebih baik dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak,15 Februari 2025

Penulis,

Muhammad Nur Nizam

B1031211011

TRANSPARANSI DANA DESA SEBAGAI FAKTOR PENTING DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS PADA KANTOR PEMERINTAH DESA HILIR, KECAMATAN BALAI, KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

Muhammad Nur Nizam

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

In this study, transparency and accountability in the financial management of village funds are very important to achieve good governance. The focus of this research is on the role of government accounting in public financial management in the context of good governance. This research also examines the elements of transparency, accountability, and community participation in the management of village funds. The qualitative method applied uses semistructured interview techniques and the data used are primary and secondary data. The main findings of this study show that to increase public trust in the village government, transparency and community participation in the management of village funds are required. This research also discusses the principles of good governance that should be applied by village governments. These principles include accountability, transparency, efficiency, equality, rule of law, strategic vision, responsiveness, and consensus orientation. This research suggests increasing transparency, accountability, and community participation in the financial management of village funds to improve governance.

Kata Kunci: Transparency, Accountability, Good Governance

TRANSPARANSI DANA DESA SEBAGAI FAKTOR PENTING DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS PADA KANTOR PEMERINTAH DESA HILIR, KECAMATAN BALAI, KABUPATEN SANGGAU

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pada sektor publik tindakan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara (Ira JURNAL AKUNTANSI DEWANTARA (JAD) VOL. 8 NO. 02 OKTOBER 2024 p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 https://doi.org/10.30738/ad.v8i2 233 Megasyara & Amrizal Imawan, 2023). Sulistyowati et al. (2022), akuntabilitas berarti tanggung jawab atas upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan melaporkan hasilnya. Peran akuntansi pemerintahan sangat krusial dalam pengelolaan keuangan publik dalam konteks Good Governance, mencakup keuangan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk juga desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan publik adalah prinsip akuntansi pemerintah yang melibatkan kedua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sebagai unit pemerintahan daerah, desa memiliki tanggungjawab untuk menerapkan prinsip tanggung jawab tersebut. Mereka harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa, serta oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintahan, baik dalam skala besar maupun kecil, harus bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan (Yusuf et al., 2021). Peraturan Nomor 22/2016 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2017, yang meliputi alokasi untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini dialokasikan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Akuntabilitas publik mengimplikasikan bahwa para pemegang amanah harus secara jelas dan transparan mengungkapkan segala tindakan yang mereka lakukan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui

pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan menciptakan sistem yang saling mendukung.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Hilir?
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh peerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Untuk menganalisis peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

4. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Hilir Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh wawancara dengan pihak terkait dan diperpleh melalui situs web resmi pemerintah Desa Hilir.

5. Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah Desa Hilir telah berupaya untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai rencana pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun dengan merujuk pada RPJM Daerah dan mencakup visi, misi, tujuan, serta program pembangunan yang jelas. Dalam pelaksanaan, pemerintah desa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kementerian terkait, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam musyawarah untuk menjaring aspirasi warga. Pemerintah desa juga melakukan musyawarah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPD) setiap akhir tahun sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai realisasi anggaran. Meskipun terdapat upaya untuk

meningkatkan transparansi, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan akses informasi bagi sebagian masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa menyediakan papan informasi dan website resmi yang terus diperbaharui untuk memfasilitasi akses informasi. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun ada tantangan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan telah menunjukkan hasil yang positif dalam pengelolaan dana desa di Desa Hilir

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Hilir telah menunjukkan hasil yang positif. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta mekanisme pelaporan yang sistematis, telah berkontribusi pada tercapainya akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup perluasan cakupan studi ke lebih banyak desa dengan karakteristik yang beragam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif seperti survei diharapkan dapat membantu dalam mengukur persepsi masyarakat secara lebih luas dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian mendatang juga disarankan untuk mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR i
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ii
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI iii
LEMBAR YURIDIS iv
UCAPAN TERIMAKASIH v
ABSTRAK viii
RINGKASAN ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
BAB II 4
KAJIAN LITERATUR 4
2.1 Landasan Teori 4
2.1.1 Agency Theory 4
2.2 Transparansi 4
2.3 Akuntabilitas 4
2.4 Penelitian Terdahulu 5
2.5 Kerangka Konseptual 7
Gambar 1. Kerangka Konseptual 7
BAB III 8
METODE PENELITIAN 8
3.1 Bentuk Penelitian 8

3.2 Lokasi Penelitian 8
3.3 Data 8
3.3.1 Jenis Data 8
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 8
3.4 Teknik Analisis Data 9
BAB IV 10
PEMBAHASAN 10
4.1 Hasil Penelitian 10
4.1.1 Tahap Perencanaan 12
4.1.2 Tahap Pelaksanaan 13
4.1.3 Tahap Pertanggungjawaban 14
4.1.4 Tantangan yang Dihadapi dalam Mewujidkan Transparasi Dana Desa 14
BAB V 16
PENUTUP 16
5.1 Kesimpulan 16
5.2 Saran 16
DAFTAR PUSTAKA 17
LAMPIRAN 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Anggaran.....12
Tabel 2 Triangulasi Data.....16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realiasi Anggaran 19
Lampiran 2 Turnitin 20
Lampiran 3 LOA 21
Lampiran 4 Artikel Pada Jurnal 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 terdapat 45 kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa. Pada tahun 2020, jumlah ini meningkat menjadi 132 kades. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 sebanyak 159 kades, hingga pada tahun 2022 angka tersebut kian menambah sebanyak 174 kades yang melakukan praktek korupsi pada dana desa. Ketidakpercayaan antara anggota masyarakat berpotensi merugikan tingkat dukungan terhadap aparat desa. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara adalah prinsip akuntabilitas. Perundang-undangan ini menetapkan bahwa segala kegiatan dan hasil dari pelaksanaan tugas negara harus dijelaskan kepada masyarakat, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum. Pada sektor publik tindakan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara (Ira JURNAL AKUNTANSI DEWANTARA (JAD) VOL. 8 NO. 02 OKTOBER 2024 p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 https://doi.org/10.30738/ad.v8i2 233 Megasyara & Amrizal Imawan, 2023). Sulistyowati et al. (2022), akuntabilitas berarti tanggung jawab atas upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan melaporkan hasilnya. Peran akuntansi pemerintahan sangat krusial dalam pengelolaan keuangan publik dalam konteks Good Governance, mencakup keuangan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk juga desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan publik adalah prinsip akuntansi pemerintah yang melibatkan kedua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sebagai unit pemerintahan daerah, desa memiliki tanggungjawab untuk menerapkan prinsip tanggung jawab tersebut. Mereka harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa, serta oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintahan, baik dalam skala besar maupun kecil, harus bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan (Yusuf et al., 2021). Peraturan Nomor 22/2016 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi menetapkan prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2017, yang meliputi alokasi untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini dialokasikan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Proses pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dengan keterlibatan dan pengawasan masyarakat. Akuntabilitas publik mengimplikasikan bahwa para pemegang amanah harus secara jelas dan transparan mengungkapkan segala tindakan yang mereka lakukan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan menciptakan sistem yang saling mendukung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Hilir?
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh peerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Untuk menganalisis peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber referensi yang berharga bagi pihak lain serta memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa, khususnya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas.

2. Peneliti

Penelitian ini juga berperan penting sebagai sarana pembelajaran pribadi bagi penulis dalam menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengelolaan dana desa, serta tantangan dan peluang yang ada, yang dapat

menjadi dasar untuk penelitian selanjut

3. Masyarakat

Penelitian ini juga dapat berperan sebagai sarana penyedia informasi yang berguna bagi pelaku UMKM lainnya yang tertarik untuk memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan praktik akuntansi merekat.